

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha yang menitik beratkan peran aktif komunitas. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak¹.

Berbicara mengenai keterlibatan masyarakat lokal dalam pariwisata yang kemudian dari hal tersebut tercipta sebuah istilah pariwisata berbasis masyarakat, atau yang dikenal dengan *Community Based Tourism* (CBT). Melalui CBT atau pariwisata berbasis masyarakat, komunitas lokal diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di daerah masing-masing dan memberikan perhatian lebih terhadap sumber daya alam, seni, dan budaya yang mereka miliki disamping meningkatkan kesejahteraan sosial melalui manfaat ekonomi yang diperoleh².

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal (1) ayat(3) menyebutkan bahwa pariwisata adalah keberagaman kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat, adapun unsur-unsur pariwisata yaitu unsur geografis, historis, dan unsur kultural. Pada kegiatan pariwisata terdapat 3 jenis kelompok kepentingan yang terdiri dari instansi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, dalam instansi pemerintah yang melibatkan pengembangan suatu potensi yaitu dengan memaksimalkan potensi pariwisata yang ada tentu

¹ Nur Hayati, *Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Tompobulu Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung* (Volume 11, No 1, 1 mei). Hlm. 48.

² Hanivah Rohmatul Janah, Ida Ayu Suryasih, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Mas, Ubud* (Volume 7. No 1, 2019). Hlm. 77.

akan memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pariwisata harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengembangan pariwisata menjadi tanggung jawab semua element yang ada seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat lokal.

Fungsi pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat menjadi isu penting untuk diteliti, yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata adalah keberagaman kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat. Dengan potensi yang dimiliki pemerintah berharap dapat memotivasi dan menjadi sebuah dorongan supaya desa dapat melakukan sebuah pengembangan untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik, setelah potensi desa berjalan, diketahui beberapa desa memiliki kemampuan dalam inovasi pengembangan, terkhusus bagi desa yang dapat mengelola potensi yang ada untuk melakukan sejumlah pengembangan yang baik, guna memajukan desa. Begitupun dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal penting ketika diletakan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan dan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa desa wisata³.

Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Provinsi Jambi, hal ini karena letak geografisnya yang strategis, memiliki sumber daya alam yang indah serta seni budaya dan adat istiadat yang khas, beragam dan terpelihara dengan baik, termasuk di Desa Sungai Sahut juga memiliki objek pariwisata, dimana objek pariwisata ini

³ Made Henny Urmila Dewi, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*(Volume 3, No 2, agustus 2013). Hlm.134.

adalah pengembangan dari sebuah rawa menjadi sebuah embung dan taman rekreasi yang dinamakan Embung *Green Hill's*.

Wisata Embung *Green Hill's* adalah objek wisata yang baru di kembangkan pada akhir tahun 2017, namun belum dikelola secara optimal, sehingga belum berdampak luas terhadap perubahan ekonomi dan sosial lingkungannya dikarenakan kurangnya pengembangan baik secara mandiri maupun secara formal institusional sehingga potensi wisata ini belum banyak diketahui oleh wisatawan umum untuk di kunjungi. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya kunjungan wisatawan ke wisata Embung *Green Hill's* dengan jumlah wisatawan kurang lebih 300 pengunjung perbulan jika dibandingkan dengan dengan jumlah pengunjung objek wisata Merangin garden dengan jumlah pengunjung mencapai kurang lebih 5000 pengunjung perbulan.

Semenjak itu pemerintah desa Sungai Sahut terus menggali potensi di bidang pariwisata untuk memberikan pengaruh positif dalam mendukung perkembangan desa dengan menggunakan inovasi wisata berbasis masyarakat. Pengembangan objek wisata berbasis masyarakat ini dilakukan sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi saat dua sektor utama Tabir Selatan fluktuaktif, seperti kelapa sawit dan perkebunan getah karet. Potensi wisata yang dimiliki oleh desa Sungai Sahut adalah embung *Green Hill's*, dimana di embung tersebut terdapat kolam renang, taman bunga, *flying fox*, mobil listrik anak-anak, motor avt serta perternakan ikan selain itu desa Sungai Sahut juga memiliki 2 PDAM pansimas.

Tabel 1.1

Realisasi Pembagunan Infrastruktur Desa Sungai Sahut Tahun 2020

Pembagunan infrastruktur	Realisasi dana
Pembagunan turap taman rekreasi	Rp. 152.280.000,-
Pembagunan <i>flying fox</i>	Rp. 85.585.500,-
Rehap gedung madrasah	Rp. 18.353.000,-
Pembagunan gedung polindes	Rp. 114.960.000,-

Sumber: Data desa Sungai Sahut

Menurut tabel diatas realisasi pembagunan infrastruktur turap taman rekreasi terealisasi dana sebesar Rp. . 152.280.000, pembagunan flaying fox sebesar Rp. 85.585.500, rehap gedung madrasah sebesar Rp. 18.353.000, pembagunan gedung polindes Rp. 114.960.000.

Objek wisata Embung *Green Hill's* saat ini dalam pengembangan secara intensif yang dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Sahut yang mana kedepannya akan menjadi simbol dari Kecamatan Tabir Selatan. tak sedikit pula muncul permasalahan dan faktor yang terkait dengan pengembangan pariwisata, seperti akses jalan yang kurang memadai, dimana akses jalan yang menghubungkan antara kota dengan Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin bisa dibilang sangat buruk terlebih lagi ketika musim hujan, begitu pun dengan fasilitas seperti belum adanya, mushola, tempat penginapan serta lahan parkir yang belum memadai, tidak optimalnya dana bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Objek wisata Embung *Green Hill's* masih dalam kendali pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin. Artinya, pengembangan dan pengembangan obyek wisata masih mengandalkan insentif dari pemerintah daerah, yang dalam perkembangannya dengan perijinan dari pemerintah daerah dapat dikelola oleh pihak swasta serta masyarakat. Beragamnya jenis obyek wisata di Merangin dapat menjadi potensi dan investasi ekonomi yang besar di masa yang akan datang, baik itu bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat sekitar, namun tentu saja dibutuhkan berbagai kebijakan proteksi yang tepat agar selalu tercipta kesinambungan diantara *stakeholder* terkait.

Namun objek wisata tersebut dapat dikatakan belum dikembangkan secara optimal baik oleh masyarakat sekitar objek pariwisata, pengelola serta pemerinatah setempat. Sarana dan prsarana yang dapat mendukung objek wisata di Merangin masih kurang seperti trasportasi dari pusat kota menuju objek wisata, dan sarana informasi. Hal tersebut dapat diaktakan masih minimnya fasilitas yang ada di objek wisata Kabupaten Merangin, padahal dengan adanya fasilitas yang mendukung dapat membantu pengembangan dalam

meningkatkan pendapatan operasional pada objek wisata Embung *Green Hill's*. Pengembangan objek wisata tersebut, ada beberapa hambatan seperti dana untuk pengembangan wisata, hal ini terlihat dari belum diperbaikinya kondisi jalan ada yang rusak, belum dibangunnya tamantaman bermain disekitar objek wisat serta fasilitas-fasilita umum lainnya. Perlunya upaya pengembangan objek wisata di desa Sungai Sahut, agar dapat bermanfaat lebih optimal, dapat memberikan pendapatan tamabahan bagi masyarakat setempat yang berusaha disektor wisata tersebut. Objek wisata di Sungai Sahut masih banyak sarana dan prasana yang masih kurang sehingga dapat dikatakan prasarana dan sarana pariwisata belum memadai

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan kepada bagaimana fungsi pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat sebagai daya tarik pariwisata desa Sungai Sahut khususnya dan Kecamatan Tabir Selatan secara umum, sebagai pemasukan pendapatan bagi BUMDes Sungai Sahut dan alternatif wisata masyarakat tersebut. Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya yang mana telah membahas tema yang sama, diantaranya adalah penelitian oleh Muhammad Shodek dengan judul Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Di Desa Wisata Wanurejo Borobudur Magelang. Penelitian ini mengakat judul tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Di Desa Wisata Wanurejo Borobudur Magelang.

Teori yang dipakai dalam menulis penelitian ini adalah *Community Based Tourism* (CBT), pengembangan dan pariwisata dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa bentuk penerapan Pariwisata Berbasis Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo antara lain menggunakan sepuluh prinsip CBT (*Community Based Tourism*) yang terdiri dari mengakui, mendukung, dan mengembangkan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata, mengikut sertakan anggota

masyarakat dalam memulai setiap aspek, mengembangkan kebanggaan komunitas, mengembangkan kualitas kehidupan, menjamin keberlanjutan lingkungan, mempertahankan keunikan karakter dan budaya masyarakat lokal, membantu perkembangannya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas, menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia, mendistribusikan keuntungan secara adil kepada anggota komunitas, berperan dalam menentukan presentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek-proyek yang ada dikomunitas.

Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Wanurejo berupa memberikan pelatihan tentang pariwisata kepada pengelola. Adapun kendala yang dihadapi oleh pengelola desa wisata dalam upaya mengembangkan desa wisata adalah sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat⁴. Penelitian kedua dari Rosita Ramadhani dengan Judul Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwi Kabupaten Lumajang). Penelitian ini menggunakan konsep pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat yaitu adanya partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan hingga pemanfaatan hasil industri kepariwisataan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Sidomulyo, fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, penyelenggaraan (pelaksanaan), pengawasan, dan pemanfaatan hasil.

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terdapat partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengembangan. Proses pengembangan telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya kurangnya

⁴ Muhammad Shodek, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Wisatawanurejo Borobudur Magelang*, Skripsi Program Studi Hospitality Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta, Tahun 2017. Hlm 1.

pengembangan dalam melaksanakan deskripsi tugas sesuai dengan struktur yang telah dibuat, belum ada kerjasama antar pemerintah, pihak pengelola dengan swasta⁵.

Penelitian ke tiga dari Muh. Reski R dengan judul Strategi Peningkatan Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Di Desa Bissoloro, Kabupaten Gowa. Wisata berbasis masyarakat atau CBT merupakan sebuah konsep dimana masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan kepariwisataan. Dalam penelitian ini, lokasi yang diteliti adalah kawasan wisata Bissoloro yang merupakan salah satu desa wisata yang menerapkan konsep CBT. Tujuannya adalah membantu masyarakat yang ada dikawasan mereka.

Setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan hasil bahwa tingkat optimalisasi CBT di Bissoloro dikategorikan cukup optimal dengan presentase 57,14%, serta strategi dalam peningkatan pengembangan wisata berbasis masyarakat dengan menerapkan strategi SO, diantaranya mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk Peraturan menteri maupun Peraturan daerah untuk meningkatkan potensi SDM baik keterampilan dalam membuat kerajinan, kepedulian akan lingkungan serta membentuk kesiapan masyarakat dalam menyambut para wisatawan, masyarakat dan swasta bekerjasama dalam mengoptimalkan potensi wisata berbasis masyarakat dengan melakukan pelatihan dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat sekitar serta membantu penyediaan kebutuhan dalam pengembangan CBT⁶.

Perbedaan penelitian terdahulu, perbedaan penelitian pertama selain tempat penelitian juga berbeda dalam menggunakan sepuluh prinsip CBT (*Community Based Tourism*) yang

⁵ Rosita Ramadhani, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwi Kabupaten Lumajang)*, Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan ilmu administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas jember, tahun 2017. Hlm 1.

⁶ Muh.Reski R, *Strategi Peningkatan Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Bissoloro, Kabupaten Gowa*, Skripsi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makasar, Tahun 2020. Hlm 1

terdiri dari mengakui, mendukung, dan mengembangkan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata, mengikut sertakan anggota masyarakat dalam memulai setiap aspek, mengembangkan kebanggaan komunitas, mengembangkan kualitas kehidupan, menjamin keberlanjutan lingkungan, mempertahankan keunikan karakter dan budaya masyarakat lokal, membantu perkembangannya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas, menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia, mendistribusikan keuntungan secara adil kepada anggota komunitas, berperan dalam menentukan presentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek-proyek yang ada dikomunitas.

Perbedaan penelitian kedua yaitu pada fokus penelitian partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, penyelenggaraan (pelaksanaan), pengawasan, dan pemanfaatan hasil. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terdapat partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengembangan.

Perbedaan penelitian terakhir yaitu strategi dalam peningkatan pengembangan wisata berbasis masyarakat dengan menerapkan strategi SO, diantaranya mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk Peraturan menteri maupun Peraturan daerah untuk meningkatkan potensi SDM baik keterampilan dalam membuat kerajinan, kepedulian akan lingkungan serta membentuk kesiapan masyarakat dalam menyambut para wisatawan, masyarakat dan swasta bekerjasama dalam mengoptimalkan potensi wisata berbasis masyarakat dengan melakukan pelatihan dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat sekitar serta membantu penyediaan kebutuhan dalam pengembangan CBT.

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Fungsi pemerintah desa Dalam Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Sungai Sahut Kabupaten Merangin, pemerintah desa Sungai Sahut terus menggali potensi di bidang pariwisata dengan menerapkan fungsi pemerintah desa dan menggunakan strategi CBT (*Community Based Tourism*) untuk

memberikan pengaruh positif dalam mendukung perkembangan desa dengan menggunakan inovasi wisata berbasis masyarakat. Pengembangan objek wisata ini dilakukan sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi, selain itu embung *Green Hill's* nantinya juga akan dikembangkan menjadi agrowisata oleh pemerintah desa Sungai Sahut.

Berdasarkan hal tersebut menarik minat peneliti untuk mengadakan sebuah penelitian tentang pemerintah desa dalam pengembangan pengembangan fasilitas objek wisata di desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan dengan judul

“FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA SUNGAI SAHUT KABUPATEN MERANGIN”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka,yang menjadi rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan fungsi pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat di desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana pengembangan wisata desa berbasis masyarakat di desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi analisis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan fungsi pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat di desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin
2. Untuk mengetahui pengembangan wisata berbasis masyarakat di desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Teoritis
 - a. Dapat menambah referensi bagi peneliti lainnya mengenai fungsi pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat, diharapkan pula dapat dijadikan pula sebagai bahan dasar untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pengembangan wisata berbasis masyarakat di desa.
- 2) Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang fungsi pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat kepada masyarakat.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi pembaca untuk mengetahui fungsi pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat.

1.5. Landasan Teori

1.5.1 Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarganya. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dami mencapai tujuan bersama. Fungsi pemerintah secara optimal dapat membantu dalam membangun masyarakat, maka fungsi pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Menurut Arif dalam Adhawati

1. Pemerintah sebagai regulator

Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar masyarakat sebagai instrument untuk mengatur sebagai kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Fungsi pemerintah sebagai dinamisator adalah penggerak partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan arahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Fungsi pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendamping melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

4. Pemerintah sebagai katalisator

Yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan Negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk membangun partisipasi⁷.

Sedangkan menurut Adam Smith, fungsi pemerintah suatu Negara dibagi menjadi 3 fungsi pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.

⁷ [Http://Repository.Unmuhjember.Ac.Id/836/1/JURNAL.Pdf](http://Repository.Unmuhjember.Ac.Id/836/1/JURNAL.Pdf) Diakses Pada 17 Desember 2021 Pukul 23:30

3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Menurut Richard. A. Musgrave, fungsi pemerintah dibedakan menjadi 3, fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik (*public needs*)
2. Fungsi distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan pertimbangan pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar, dan sebagainya.
3. Fungsi stabilisasi (*Stabilization Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada guna mempertahankan kestabilan perekonomian⁸.

1.5.2 Pemerintah desa

Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya.

⁸ <https://www.seluncur.id/fungsi-pemerintah/> Diakses Pada 23 Juni 2022 Pukul 16:04

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹.

1.5.3. Pengembangan objek wisata

Menurut Siswanto pengembangan merupakan suatu aktivitas yang sistematis saling bersesuaian agar tercapai tujuan, pengembangan kawasan wisata ditujukan untuk melindungi tata nilai asli saat area dikembangkan. Sarana akomodasi, sumber daya manusia, produk jasa, kepemimpinan, produk dan kemasan, seyogyanya secara hati-hati dikembangkan dengan mengadopsi tata nilai asli serta melibatkan penduduk lokal. Kegiatan pariwisata ini akan membawa dampak positif bagi berbagai aspek kehidupan baik pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya langsung akan dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daerah tempat tujuan wisata¹⁰.

Ada tiga faktor yang dapat menentukan berhasilnya pengembangan pariwisata sebagai industri, ketiga faktor tersebut diantaranya yaitu:

1. Tersedia fasilitas
2. Objek atraksi wisata
3. aksesibilitas

⁹ Sugiman, *Pemerintahan Desa* (Volume 7. No.1, Juli 2018). Hlm 83-84

¹⁰ Ni Luh Made Suryani, Dkk, *Analisis Manajemen Pengembangan Obyek Wisata Dalam Mewujudkan Pembanguna Pariwisata Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa Adat(BUMDA)(Studi Kasus Obyek Wisata Pantai Pandawa Kuta Selatan Kabupaten Badung)*. Hlm. 3

Sehingga bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Faktor lain yang cukup penting yaitu fasilitas, tersedianya fasilitas-fasilitas seperti penginapan, restoran, hiburan dan transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan berpergian, ketempat-tempat tersebut¹¹.

Dari penjelasan diatas terdapat indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat keberlanjutan suatu destinasi wisata menurut *World Tourism Organization* (WTO) yaitu:

1. Kesejahteraan (*well being*) masyarakat tuan rumah.
2. Partisipasi masyarakat.
3. Jaminan kesehatan dan keselamatan.
4. Manfaat ekonomi.
5. Perlindungan terhadap aset alami
6. Pengembangan sumber daya alam yang langka.
7. Pembatasan dampak dan,
8. Perencanaan pengendalian pembagunan¹².

1.5.4. Manajemen Pariwisata

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan manajemen yang baik dan efektif menghasilkan keberhasilan dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tergantung dari manajemennya dan untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi diperlukan fungsi dan proses manajemen yang dibagi menjadi beberapa fungsi manajemen. Menurut Flippo, fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi. Tahap perencanaan berkaitan dengan penentuan mengenai

¹¹ Marjulita, Dkk, *Pengembangan Objek Wisata Aceh Jaya: Harapan Dan Kenyataan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*(Volume 5, No. 1, April 2019). Hlm. 86.

¹²<https://www.hestanto.web.id/Definisi-Pariwisata-Indikator-Perkembangan-Objek-Dan-Daya-Tarik/> Diakse Pada 12 Oktober 2021 Pukul 21:04

program tenaga kerja, program kegiatan akan dilaksanakan dan yang akan mendukung pencapaian tujuan dan penunjang manajemen¹³. Tahap Pengorganisasian yaitu organisasi yang dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya. Tahap Pengawasan adalah pengarahan yang terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing yaitu menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan SDM supaya karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh manajemen Monkasel. Pitana menekankan bahwa koordinasi merupakan fungsi utama dan terpenting yang harus dipisahkan dan memerlukan pembahasan tersendiri. Fungsi koordinasi merujuk kepada fungsi seseorang manajer untuk menerjemahkan sebuah informasi, seperti perencanaan dan pengawasan, dan mengaplikasikan informasi tersebut secara sistematis ke dalam semua fungsi manajerial yang diterjemahkan secara nyata dalam kegiatan *directing, planning, and controlling*. Hasibuan mengemukakan bahwa tujuan manajemen dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu menurut tipenya:

- a. *Profit objectives* bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya
- b. *Service objectives* bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen.
- c. *Social objectives* bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan oleh perusahaan kesejahteraan masyarakat.
- d. *Personal objectives* bertujuan agar para karyawan secara individual, economic, and social psychological mendapat kepuasan dibidang pekerjaannya dalam perusahaan. Seorang manajer dapat mengelola input, proses dan output dari sistem organisasinya namun tidak dapat mengelola dan mengontrol faktor-faktor yang berada di luar organisasi meski faktor-faktor tersebut ikut menentukan bagaimana organisasi tersebut berjalan. Jadi cakupan dan limit dari manajemen tergantung pada sistem organisasi dimana kekuasaan manajerial diaplikasikan. Pengelolaan pariwisata harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian

¹³<https://Text-Id.123dok.Com/Document/Oz1r6m23q-Manajemen-Pariwisata-Landasan-Teori.Html> Diakses Pada 17 September Pukul 18:23

lingkungan alam, komunitas dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.

Pengembangan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan local dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi Basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas carrying capacity lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.5.5. *Community Based Tourism*

Saat ini pariwisata berbasis masyarakat yang dikenal dengan istilah CBT (*Community Based Tourism*) sangat populer dilakukan dalam bentuk sebuah strategi pembangunan dalam bidang pariwisata. Konsep ini memiliki tujuan untuk melakukan suatu peningkatan intensitas partisipasi masyarakat, sehingga dapat memberikan peningkatan dalam bidang ekonomi serta masyarakat memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola suatu pembangunan dalam bidang pariwisata.

Menurut Sugiarti dalam Wicaksono: Dalam pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci agar pengembangan desa wisata berjalan dengan

tujuan yang diinginkan. Peran masyarakat sangat diperlukan baik dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan evaluasi kerja. Sebagai komponen utama dalam *Community Based Tourism* (CBT), masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata akan sulit terwujud ketika masyarakat setempat merasa diabaikan, hanya sebagai objek, serta merasa terancam oleh kegiatan pariwisata di daerah mereka¹⁴.

ada empat tujuan yang diinginkan dengan berlakunya konsep pariwisata yang berbasis masyarakat.

1. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi untuk meningkatkan dan atau memperbaiki konservasi alam atau sumber daya budaya, termasuk keanekaragaman hayati.
2. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal sehingga meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi masyarakat.
3. Pariwisata berbasis masyarakat harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
4. Pariwisata berbasis masyarakat mempunyai tanggung-jawab kepada wisatawan untuk memberikan produk yang peduli terhadap lingkungan alam, sosial, maupun budaya.

Menurut Suansri, mendefinisikan CBT (*Community Based Tourism*) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya, aspek utama pengembangan CBT (*Community Based Tourism*) berupa lima dimensi, yaitu:

1. Dimensi ekonomi

¹⁴Ni Luh Gede Ratnaningsih, Dkk, *Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali)*. Hlm. 48.

Indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

2. Dimensi sosial

Meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.

3. Dimensi budaya

Mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu perkembangan pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya loka

4. Dimensi lingkungan

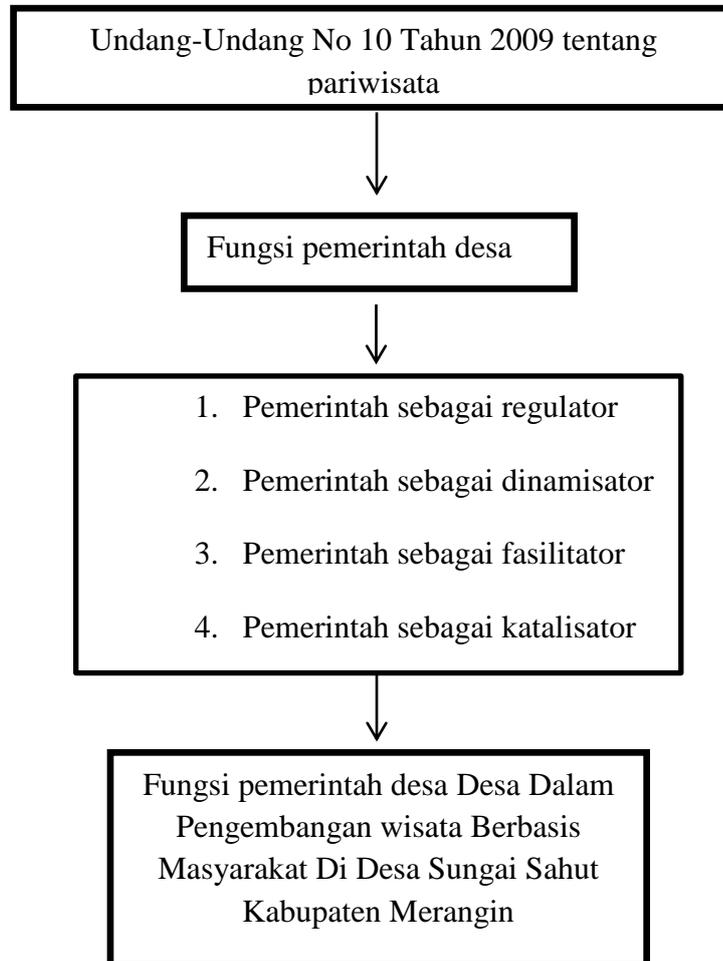
Mempelajari *carryng capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulianakan perlunya konservasi.

5. Dimensi politik

Meningkatkan partisipasi penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengembangan SDM¹⁵.

¹⁵ I Nyoman Rasmien Adi, Made Mulyadi, *Mediasi Community Based Tourism Pada Pengaruh Peran Desa Adat Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli*(Volume 14, No 3 Ottober 2019). Hlm.2271.

1.6. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Berdasarkan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). *Sistematis* artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu digunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis¹⁶.

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data *empiris* (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat di kumpulkan oleh peneliti. Misalnya dalam masyarakat tertentu dapat 5000 orang miskin, maka derajat validitas hasil penelitian itu rendah atau misalnya dalam suatu unit kerja pemerintahan, dimana dalam unit kerja tersebut iklim kerjanya sangat bagus, sementara peneliti melaporkan iklim kerjanya tidak bagus, maka data yang dilaporkan tersebut juga tidak valid. Untuk mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian sering sulit dilakukan, oleh karena itu data yang telah terkumpul sebelum diketahui validitasnya, dapat diuji melalui pengujian *reliabilitas* dan *obyektivitas*. Pada umumnya kalau data itu reliable dan obyektif, maka terdapat kecendrungan data tersebut akan valid.

¹⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), Hlm. 2.

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian sangat erat hubungannya dengan suatu metode, karena dalam penggunaan metode penelitian harus disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan yang akan dikaji. Keberhasilan dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari suatu metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat menjawab permasalahan tentang gejala-gejala sosial yang memerlukan pemahaman secara mendalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan dengan kondisi objek terjadi di lapangan tanpa manipulasi, seperti yang dijelaskan oleh Moleong tentang penjelasan kualitatif sebagai berikut¹⁷: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang akan dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu koneksi khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah.

Dalam menggunakan penelitian kualitatif, data yang didapat lebih lengkap dan lebih mendalam karena dalam proses penelitian kualitatif ini melakukan pengamat terhadap kehidupan sehari-hari, melihat interaksi dengan peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dan program yang akan dikembangkan akan memungkinkan untuk dilaksanakan.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam proposal ini dilaksanakan di Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin .

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan fungsi pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat, mamajukan objek wisata desa serta sebagai daya

¹⁷*Ibid*, Hlm. 9.

tarik pariwisata desa Sungai Sahut khususnya dan Kecamatan Tabir Selatan umumnya, sebagai pemasukan pendapatan bagi BUMDes Sungai Sahut dan alternatif wisata masyarakat setempat.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dimana saya langsung mengamati lokasi dan melakukan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya¹⁸, yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer ini disebut juga sumber data yang langsung diberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Adapun yang dijadikan data primer adalah data yang sifatnya berkaitan dengan objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data¹⁹. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

¹⁸Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hlm. 16.

¹⁹Djaman Satori, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Alfabeta, 2011), Hlm. 542.

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu²⁰. Informan penelitian ini adalah kepala desa Sungai Sahut, kepala Bumdes desa Sungai Sahut, Kabid Sosial Desa Sungai Sahut, BPD Desa Sungai Sahut serta masyarakat setempat sebagai informan , karena peneliti menganggap bahwa ke 5 orang tersebut mengetahui masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Berikut ini informan yang dibutuhkan peneliti.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Khusaini	Kepala Desa Sugai Sahut
2	Agus Muslim	Kepala Bumdes Sungai Sahut
3	Jumikan	Kabid Sosial Desa Sungai Sahut
4	Syatibi	BPD Desa Sungai Sahut
5	Pengunjung	Masyarakat

Informan untuk melakukan wawancara

Peneliti memilih kepala desa sungai sahut sebagai informan karena letak dari obyek wisata berada di desa tersebut.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

A. Teknik Observasi

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006). Hlm 107.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang teliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keadaan (Reliabilitas dan kesahihan Validasinya)²¹. Tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini tidak menutupi dirinya selaku peneliti.

B. Teknik Wawancara

Esterberg mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²².

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan harapan mampu mengarahkan kepada kejujuran sikap dan pemikiran subyek penelitian ketika memberikan informasi agar informasi yang diberikan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara adalah data mengenai peran kepemimpinan dan kesetaraan gender dalam birokrasi, yang meliputi : pelaksanaan ,penerapan dan evaluasi.

C. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif²³.

1.7.7. Teknik Analisis Data

²¹Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm. 52.

²²Sugiyono, Op. Cit. Hlm.231.

²³ *Ibid.* Hlm. 81

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data lapangan model Miles dan Huberman. Dijelaskan dalam buku karya Sugiyono, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu²⁴.

Berlangsung bersamaan proses pengumpulan data. Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan tujuan memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul.
- b. Menetapkan konsep-konsep kunci atau konsep dasar yaitu menetapkan pokok-pokok pengertian yang bersifat konseptual yang mendasari dan mengarah kepada pemecahan masalah.
- c. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif yang didasarkan kepada aspek yang diteliti. Dengan demikian kemungkinan dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti.
- d. Simpulan atau verifikasi, yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pertanyaan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yang diteliti.

²⁴*Ibid.* Hlm. 233.

- e. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif yang merupakan upaya yang berlanjut,berulang dan erus menerus. Dengan demikian dalam penelitian ini mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang terkait pada sebelum dan sesudah pengumpulan data.

1.7.8. Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam hal ini melihat kecocokan antara data yang diperoleh peneliti dengan kejadian yang menjadi fenomena yang ingin diteliti²⁵. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi metode (*methodological triangulation*), yang dimaksud dengan triangulasi metode adalah mengecek data kepada sumber yang samadengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Jika menghasilkan data yang berbeda-beda, bisa jadi semuanya benar, karna sudut pandang yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

²⁵*Ibid.* Hlm. 241